

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019-2023

Jossy Fareza Tanjung

NPP. 32.0076

Asdaf Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0076@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Tun Huseno, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Fiscal independence is one of the key pillars in the success of regional autonomy. However, in reality, many local governments, including Asahan Regency, still experience a high level of dependency on transfer funds from the central government. The Locally Generated Revenue (PAD) has not yet been able to optimally support regional financing. **Purpose:** To assess the financial performance of the Asahan Regency Government. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The analysis refers to the theory of regional financial ratios by Mahmudi (2019). **Result:** The results show that the PAD effectiveness ratio falls into the less effective category (average 83.66%), the independence ratio is very low (average 11.18%), the degree of decentralization is very poor (average 9.10%), and the dependency ratio is very high (average 82.24%). The main inhibiting factors are inadequate planning, limited infrastructure, and reliance on unstable economic sectors. However, there are supporting potentials in the form of vast territory, fertile land, and promising agricultural and plantation sectors. **Conclusion:** The financial performance of the Asahan Regency Government remains suboptimal, with a high dependency on central government funds. Strategies to increase PAD are needed through policy innovation, optimal use of regional assets, and strengthening of efficient and transparent financial management. **Keywords:** Financial Performance, Regional Financial Ratios, PAD

ABSTRAK

Rumusan Masalah/Latar Belakang (GAP): Kemandirian fiskal merupakan salah satu pilar penting dalam keberhasilan otonomi daerah. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Asahan, masih mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan belum mampu menopang pembiayaan daerah secara optimal. **Tujuan:** Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori rasio keuangan daerah dari Mahmudi (2019). **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD berada pada kategori kurang efektif (rata-rata 83,66%), rasio kemandirian sangat rendah (rata-rata 11,18%), derajat desentralisasi sangat kurang (rata-rata 9,10%), dan rasio ketergantungan sangat tinggi (rata-rata

82,24%). Faktor penghambat utama adalah perencanaan yang kurang matang, minimnya infrastruktur, serta ketergantungan pada sektor ekonomi yang tidak stabil. Namun, terdapat potensi pendukung berupa luas wilayah, kesuburan tanah, dan potensi sektor pertanian dan perkebunan. **Kesimpulan:** Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan masih belum optimal, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat. Diperlukan strategi peningkatan PAD melalui inovasi kebijakan, pemanfaatan aset daerah, serta penguatan pengelolaan keuangan secara efisien dan transparan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah, PAD

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah di Indonesia membawa konsekuensi logis berupa tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah daerah diberi kewenangan luas dalam mengelola keuangan, khususnya dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemandirian fiskal. Menurut Soegijanto (2020), otonomi keuangan daerah menuntut pemerintah daerah mampu mengelola pendapatannya sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada pusat, sebagai bentuk nyata dari desentralisasi fiskal.

Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kabupaten Asahan menjadi salah satu contoh daerah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan pusat. Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019–2023 memperlihatkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah dan fluktuatif, dengan realisasi terendah hanya mencapai 63,25% dari target pada tahun 2021. Ketergantungan ini menjadi tantangan serius bagi otonomi fiskal daerah dan berdampak pada fleksibilitas daerah dalam pengambilan keputusan pembangunan. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Hasan (2022), yang menyatakan bahwa ketergantungan fiskal yang tinggi dapat melemahkan daya saing daerah dan menimbulkan stagnasi dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks ini, pengukuran kinerja keuangan daerah melalui analisis rasio, seperti rasio efektivitas PAD, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan, menjadi penting untuk mengetahui kapasitas fiskal dan efektivitas tata kelola keuangan daerah. Menurut Martinez-Vazquez dan Boex (2001), rasio keuangan daerah dapat dijadikan indikator strategis dalam menilai efektivitas desentralisasi fiskal. Sementara itu, Smoke (2015) menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat tergantung pada kapasitas kelembagaan dan fiskal di tingkat lokal. Selain itu, Faguet (2014) menekankan pentingnya tata kelola keuangan lokal yang kuat sebagai prasyarat agar desentralisasi mampu mendorong peningkatan kinerja pembangunan. Selain itu, Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) menemukan bahwa tanpa pemerataan kapasitas fiskal antar daerah, desentralisasi justru dapat memperburuk ketimpangan dan menghambat efektivitas pembangunan ekonomi lokal.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun berbagai studi telah dilakukan terkait analisis rasio keuangan daerah sebagai alat ukur kinerja keuangan, terdapat beberapa celah yang belum banyak dijelajahi, khususnya dalam konteks Kabupaten Asahan. Konteks lokal yang spesifik, Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada daerah lain dan cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengangkat konteks Kabupaten Asahan secara spesifik dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya Rentang waktu yang representatif dan terkini, Penelitian ini mencakup lima tahun terakhir (2019–2023), termasuk masa pandemi COVID-19, yang berdampak langsung pada kinerja keuangan daerah. Penelitian ini dapat menangkap dinamika fiskal daerah dalam situasi krisis maupun pemulihan. Serta Fokus pada hubungan antarrasio dengan kemandirian fiskal, Penelitian ini tidak hanya menilai masing-masing rasio secara parsial, tetapi juga mengaitkannya dengan tingkat ketergantungan dan efektivitas fiskal sebagai cerminan keberhasilan desentralisasi keuangan.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan studi tentang kinerja keuangan daerah di Kabupaten Asahan, sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan PAD dan penguatan kemandirian fiskal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti melampirkan beberapa contoh dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan maupun perbandingan karena memiliki keterkaitan topik dan pembahasan yang sama yaitu analisis kinerja keuangan.

Penelitian Pertama oleh Marliani (2022) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016–2020. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah dengan hubungan konsultatif. Rasio derajat desentralisasi masih kurang karena kontribusi PAD minim. Rasio efektivitas PAD tergolong efektif, sedangkan rasio efisiensi belanja termasuk efisien.

Penelitian Kedua Qur'ani & Panggiarti (2021) yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Kota Magelang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Rasio kemandirian 38,73% tergolong tidak mandiri. Rasio efektivitas 110,85% tergolong efektif. Namun, rasio efisiensi 100,22% tergolong tidak efisien dan rasio keserasian belanja serta pertumbuhan tergolong rendah dan tidak harmonis.

Penelitian Ketiga oleh Saifrizal (2022) yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada BPKD Di Kabupaten Bireuen. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Rasio efektivitas 102,63% (efektif), efisiensi 100,56% (efisien), rasio pertumbuhan menunjukkan fluktuasi, sedangkan rasio kemandirian sangat rendah (0–25%) yang menandakan dominasi peran pusat.

Penelitian Keempat oleh Putri et al. (2021) yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Rasio efektivitas 90,49% (efektif), kemandirian 27,96% (rendah), dan rasio desentralisasi fiskal 17,85% (kurang baik). Tren efektivitas, kemandirian, dan desentralisasi menunjukkan variasi dari sedang hingga meningkat.

Penelitian Kelima oleh Haridison & Permana (2021) yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja APBD Kabupaten Barito Selatan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Rasio kemandirian 6,09%, efektivitas 91,47%, efisiensi 2,18%,

serta rasio aktivitas belanja langsung dan tidak langsung menunjukkan dominasi belanja operasional. Kinerja keuangan menurun dan butuh kebijakan strategis.

1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah

Kebaruan dalam penelitian ini tercermin dari pemilihan lokasi studi, yaitu Kabupaten Asahan, yang masih jarang dijadikan objek kajian dalam analisis rasio keuangan daerah. Penelitian ini juga mencakup rentang waktu 2019–2023 yang meliputi masa pandemi COVID-19, sehingga memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai fluktuasi kinerja keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif dan terbatas pada beberapa rasio, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis yang lebih menyeluruh terhadap rasio efektivitas, kemandirian, derajat desentralisasi, dan ketergantungan. Selain itu, penelitian ini menyajikan rekomendasi strategis untuk mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Asahan dengan pengukuran analisis rasio keuangan, menganalisis hambatan dan pendukung kinerja keuangan serta upaya pemerintah daerah Kabupaten Asahan dalam menangani hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dari sudut pandang pelaku atau informan. Seperti yang dikemukakan oleh Nurdin dan Hartati (2019:42), pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek secara alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci, serta memanfaatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara induktif dengan fokus pada makna daripada generalisasi. Simangunsong (2017:190) juga menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif bersifat fleksibel dan dinamis, karena dapat menyesuaikan diri dengan fenomena yang muncul sewaktu-waktu di lapangan.

Menurut Liamputtong (2020), metode kualitatif membuat peneliti menggali pengalaman dan pemahaman subjektif individu dalam konteks sosial tertentu melalui wawancara mendalam, studi kasus, dan observasi. Pendekatan ini sejalan dengan strategi penelitian ini untuk mendapatkan perspektif dari aktor-aktor birokrasi daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Asahan. Hal ini memperkuat validitas makna dari data yang diperoleh. Bogdan dan Taylor (dalam Ruskarini, 2017:10) juga menyebutkan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati secara menyeluruh dalam latar alami. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat sesuai untuk mengkaji fenomena keuangan publik di tingkat daerah yang tidak hanya ditentukan oleh angka, tetapi juga oleh dinamika birokrasi dan konteks sosial yang melingkupinya.

Dalam konteks kebijakan publik dan administrasi keuangan, Riyadi (2020) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif menjadi relevan karena pengelolaan keuangan daerah tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui data statistik, tetapi juga melalui proses, persepsi, dan interaksi antar pelaksana kebijakan di lapangan. Teknik pengumpulan data merujuk pada pendapat Sugiyono (2016:225), yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih

secara purposive, sesuai dengan penjelasan Moleong (2015:163), yaitu individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap fokus penelitian. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari pejabat dan staf di BPKAD Kabupaten Asahan yang terlibat langsung dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Asahan, peneliti menggunakan teori Analisis Rasio Keuangan Daerah (Mahmudi:2019) yang memiliki 4 dimensi yaitu:

1. Efektivitas PAD dengan indikatornya Target Penerimaan PAD dan Realisasi Penerimaan PAD.
2. Kemandirian Keuangan Daerah dengan indikatornya Total PAD dan Transfer Pusat, Provinsi, dan Pinjaman
3. Derajat Desentralisasi dengan indikatornya Total PAD dan Total Pendapatan Daerah
4. Ketergantungan Keuangan Daerah dengan indikatornya Total Pendapatan Transfer dan Total Pendapatan Daerah

3.1 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Pada dimensi Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PAD berada pada rentang 63,25% hingga 96,80%, dengan rata-rata sebesar 83,66%, yang dikategorikan sebagai kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD belum sepenuhnya optimal dan masih jauh dari target yang ditetapkan, terutama pada tahun 2021 yang sangat rendah.

Pada dimensi Rasio kemandirian mengukur sejauh mana daerah mampu membiayai pemerintahannya sendiri tanpa tergantung pada dana pusat. Kabupaten Asahan menunjukkan nilai rata-rata kemandirian 11,18%, berada pada kategori sangat rendah (instruktif). Artinya, ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat masih sangat dominan, dan PAD belum mampu menopang kebutuhan pembiayaan daerah secara mandiri.

Pada dimensi Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebagai indikator kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi. Nilai rata-rata rasio ini sebesar 9,10%, dikategorikan sangat kurang. Artinya, Pemerintah Kabupaten Asahan belum mampu melaksanakan desentralisasi fiskal secara optimal karena PAD yang dihasilkan masih kecil dibandingkan total pendapatan daerah.

Pada dimensi Rasio ketergantungan menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Kabupaten Asahan mencatat nilai rata-rata sebesar 82,24%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Asahan sangat tergantung pada dana perimbangan dan belum mampu membiayai sebagian besar kebutuhannya dari pendapatan sendiri.

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

1. Faktor Penghambat

a. Efektivitas dan Efisiensi

Secara keseluruhan, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa banyak daerah otonom, termasuk Kabupaten Asahan, masih menghadapi tantangan dalam mencapai tingkat kemandirian fiskal yang optimal. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, hasilnya masih menunjukkan rasio yang kurang efisien dan sangat rendah, baik dalam penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) maupun belanja daerah. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Asahan tidak berhasil mencapai target penerimaan PAD, dan belanja daerah juga belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Akibatnya, meskipun terdapat surplus anggaran, potensi ini tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. Pandemi Covid-19 turut memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi, mengakibatkan penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran, yang pada akhirnya mempengaruhi perencanaan keuangan daerah. Secara keseluruhan, perencanaan yang kurang matang menjadi faktor utama ketidaksesuaian antara target dan realisasi, dan perlu ada langkah strategis dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan serta memanfaatkan potensi sumber daya daerah secara maksimal.

b. Potensi Kekayaan Daerah

Kabupaten Asahan memiliki potensi daerah utamanya dibidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Namun, hal ini juga berkurang dimana sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Asahan juga mengalami pasang surut serta semakin berkurangnya komoditas di sektor tersebut. Ketergantungan pada sektor perkebunan dan pertanian, terutama kelapa sawit dan karet. Ketergantungan pada komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar global mengakibatkan pendapatan daerah menjadi tidak stabil. Saat harga komoditas turun, dampaknya sangat terasa pada perekonomian daerah secara keseluruhan.

c. Infrastruktur

Infrastruktur memegang peranan vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di Kabupaten Asahan masalah minimnya infrastruktur masih menjadi tantangan besar. Banyak jaringan jalan di pedesaan yang rusak dan belum beraspal, serta jembatan penghubung antar kecamatan yang terbatas dan perlu perbaikan. Sektor pertanian juga terhambat dengan sistem irigasi yang belum menjangkau seluruh lahan, saluran drainase terbatas, dan pengelolaan sumber daya air yang belum optimal. Masalah infrastruktur ini menghambat aktivitas perekonomian daerah.

2. Faktor Pendukung

Pelaksanaan kinerja keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu penerimaan daerah, belanja

daerah, dan pembiayaan daerah. Kabupaten Asahan memiliki berbagai faktor yang mendukung kinerja keuangan daerah, salah satunya adalah luas wilayahnya yang mencapai 3.732,97 km². Wilayah ini tergolong cukup luas dibandingkan daerah lain di Provinsi Sumatera Utara, menempati urutan ke-8 dari 33 daerah yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. Luasnya wilayah Kabupaten Asahan memberikan potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Selain itu, Kabupaten Asahan juga memiliki karakteristik wilayah yang subur, menjadikannya daerah yang sangat potensial untuk sektor pertanian dan perkebunan. Kesuburan tanah ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai komoditas unggulan, seperti kelapa sawit, karet, dan padi, yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan sektor pertanian dan perkebunan yang kuat, Kabupaten Asahan memiliki daya tarik tersendiri bagi investor yang ingin berinvestasi dalam bidang agribisnis, industri pengolahan hasil pertanian, serta sektor perdagangan yang terkait dengan komoditas unggulan daerah.

3.3 Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Asahan berupaya meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pemerintahan. Upaya ini melibatkan beberapa strategi penting, di antaranya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui perbaikan sistem administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penerapan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pemanfaatan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan dan properti pemerintah, untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Pemerintah Kabupaten Asahan juga menggali potensi sektor ekonomi lokal yang dapat meningkatkan PAD, seperti pariwisata, perdagangan, pertanian, dan industri kreatif. Dengan menciptakan kebijakan yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, diharapkan lebih banyak investor yang tertarik berinvestasi di daerah ini, yang pada gilirannya akan membuka peluang kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta meningkatkan penerimaan daerah. Selain peningkatan pendapatan, pemerintah daerah juga berfokus pada efisiensi pengelolaan belanja daerah. Anggaran yang tersedia dialokasikan secara selektif dengan memprioritaskan program yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, diharapkan Kabupaten Asahan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan profesional.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah daerah berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Asahan. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih mandiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian mengenai analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2019–2023 menunjukkan hasil yang sejalan sekaligus berbeda dengan berbagai penelitian sebelumnya yang mengkaji aspek efektivitas pengelolaan PAD, kemandirian fiskal, derajat desentralisasi, dan tingkat ketergantungan daerah terhadap dana pusat. Dalam diskusi ini, peneliti membandingkan temuan-temuan yang diperoleh di Kabupaten Asahan dengan hasil dari lima penelitian terdahulu yang menyoroti kondisi keuangan daerah lainnya.

Pada dimensi rasio efektivitas, penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas PAD

Kabupaten Asahan berada pada angka 83,66%, yang tergolong kurang efektif. Hasil ini sejalan dengan temuan Marliani (2022) di Kabupaten Bandung dan Qur'ani & Panggiarti (2021) di Kota Magelang yang juga menemukan bahwa efektivitas PAD belum mencapai optimal, meskipun masih dalam kategori cukup. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian Aan Nurrohman et al. (2023) di Kota Madiun, yang menunjukkan efektivitas PAD sangat tinggi, di atas 100%, mengindikasikan kinerja pengelolaan pendapatan yang lebih optimal dibandingkan Asahan.

Pada aspek rasio kemandirian, penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Asahan sangat rendah dengan rata-rata 11,18%, yang berada pada kategori instruktif. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Saifrizal (2022) di Kabupaten Bireuen dan Putri et al. (2021) di Provinsi Lampung, yang menunjukkan dominasi dana transfer pusat dalam struktur pendapatan. Namun, dalam penelitian Dea Sahilla (2024) di Kabupaten Sumedang, meskipun kontribusi PAD masih perlu ditingkatkan, korelasi antara PAD dan kemandirian fiskal sudah menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan, berbeda dengan kondisi Asahan yang belum mampu menggerakkan PAD sebagai sumber kekuatan fiskal utama.

Dalam dimensi derajat desentralisasi fiskal, Kabupaten Asahan hanya mencatat rata-rata 9,10%, yang menandakan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah. Hasil ini selaras dengan penelitian Haridison & Permana (2021) yang menemukan bahwa belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional dan pendapatan daerah sebagian besar berasal dari transfer pusat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya desentralisasi fiskal belum berjalan maksimal di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Asahan.

Pada rasio ketergantungan, hasil penelitian menunjukkan angka rata-rata sebesar 82,24%, yang tergolong sangat tinggi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Qur'ani & Panggiarti (2021), yang menemukan bahwa Kota Magelang juga memiliki ketergantungan fiskal tinggi terhadap pusat. Fadilah Fitri dan Hurian Kamela (2025) juga menunjukkan gejala serupa di Kabupaten Banyumas. Artinya, kondisi fiskal daerah di banyak wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Asahan, masih belum mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Secara umum, penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa tantangan utama dalam keuangan daerah terletak pada rendahnya kontribusi PAD, lemahnya kemandirian fiskal, dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa efektivitas pengelolaan PAD di Asahan belum optimal jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang telah mencapai tingkat efektivitas tinggi. Oleh karena itu, kontribusi empiris dari penelitian ini terletak pada penegasan bahwa peningkatan PAD harus menjadi prioritas strategis dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan berdasarkan empat indikator pengukuran rasio keuangan daerah, yaitu rasio efektivitas, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan secara keseluruhan menunjukkan bahwa kondisi Kabupaten Asahan masih berada dalam kategori kurang optimal dalam kinerja keuangan daerah. Faktor yang menghambat kinerja keuangan daerah Kabupaten Asahan. Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurangnya optimalisasi dalam pemanfaatan potensi kekayaan daerah, serta belum tersedianya infrastruktur yang optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta terdapat pula faktor yang mendukung

kinerja keuangan daerah, salah satunya adalah luasnya wilayah Kabupaten Asahan yang disertai dengan kondisi tanah yang subur. Adapun upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan di Kabupaten Asahan pemerintah daerah menerapkan berbagai strategi guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk melalui pengelolaan keuangan yang lebih efektif, inovasi dalam peningkatan PAD, serta eksplorasi potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan baru

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pada aspek waktu dan biaya. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada satu wilayah administratif, yaitu Kabupaten Asahan, yang dijadikan sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Asahan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kabupaten Asahan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Hasan, M. (2022). Ketergantungan fiskal daerah dan dampaknya terhadap daya saing daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 15(3), 45-62. <https://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jeb/article/view/1046>
- Haridison, D., & Permana, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja APBD Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Ilmu Manajemen Publik*, 7(2), 80–92. <https://www.academia.edu/79683387/>
- Liamputtong, P. (2020). *Qualitative Research Methods* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/qualitative-research-methods-9780190304287>
- Martinez-Vazquez, J., & Boex, J. M. (2001). The design of equalization grants: Theory and application. *World Bank Institute Working Papers*, 1–35. <https://decentralization.net/wp-content/uploads/2018/05/ModulePartTwo.pdf>
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marliani. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016–2020. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 12–25. <https://ojs.stan-im.ac.id/index.php/JSMA/article/view/84>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Putri, D., Kurniawati, R., & Sofyan, M. (2021). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja

- Kuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 44–58. <https://www.researchgate.net/publication/352480931>
- Qur'ani, R. R., & Panggiarti, P. (2021). Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Kota Magelang. *BILANCIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 60–72. <https://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/897>
- Riyadi, S. (2020). *Administrasi Publik dan Kebijakan Pemerintahan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2010). *Does decentralization matter for regional disparities A cross-country analysis*. *Journal of Economic Geography*, 10(5), 619–644. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbp049>
- Ruskarini, T. (2017). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Mengutip: Bogdan, R., & Taylor, S. J.)
- Saifrizal. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada BPKD Di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 6(3), 110–122. <https://www.researchgate.net/publication/364538126>
- Simangunsong, F. (2017). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112. <https://doi.org/10.1002/pad.1703>
- Soegijanto, S. (2020). *Otonomi keuangan daerah: Konsep dan tantangan dalam desentralisasi fiskal*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.